

Jurnal RAK  
(Riset Akuntansi Keuangan)

volume 2 nomor 3

<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK>

# MENGUAK SISI KETIDAKSERAGAMAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARAWAN DAN REKANAN PEMERINTAH

Oleh: <sup>1</sup>Dwi Andriani

<sup>2</sup>Emi Rahmawati

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

<sup>1</sup>[dwiandriani1993@gmail.com](mailto:dwiandriani1993@gmail.com), <sup>2</sup>[emi.rahmawati@trunojoyo.ac.id](mailto:emi.rahmawati@trunojoyo.ac.id)

Info artikel

Riwayat artikel

Penyerahan Juli

2017

Diterima Serptember

2017

Diterbitkan Oktober

2017

*Keywords:*

*Treasurers, Heterogeneity,*

*Collection of Value*

*Added Tax, Government*

*Partner*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemaknaan atau pandangan para aktor terkait penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai untuk menguak ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretif. Informan penelitiannya adalah Bendahara Pengeluaran Universitas Trunojoyo Madura, Rekanan-rekanan yang bertransaksi dengan instansi Pemerintah serta *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Februari hingga bulan April 2015. Oleh karena itu ketentuan perpajakan yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah ketentuan yang berlaku pada saat kasus tersebut terjadi. Sumber data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktanya di lapangan ternyata masih banyak Rekanan Pemerintah yang tidak tahu dan tidak paham tentang fungsi penunjukan Bendaharawan, Penerbitan Faktur, Surat Setoran Pajak serta Pembayaran pada Rekanan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Abstract

*This study aimed to examine the meaning of the performers or view related policies designation Treasurer collects Value Added Tax collection practices to uncover heterogeneity of Value Added Tax. This research uses qualitative research with an interpretive phenomenological approach. The treasurer informant research is Trunojoyo University, Government's Partner who transact with government agencies and Account Representative at the tax office. This study was conducted over two months, starting in February until April 2015. Therefore, tax provisions are used as a tool of analysis in this study was the provision applicable at the time the case occurred. The source of data used are structured and unstructured interviews, observation, and documentation. The results of this study showed that the facts on the ground there are still many Partner This has led to the implementation of the unevenness in the collection of value added tax. The shape of heterogeneity among others: the determination of the Tax Base, Publishing Invoice, Tax Deposit and Payment on Partner does not comply with the applicable rules.*

## Pendahuluan

Bendahara Pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kanwil DJP Jakarta Selatan, Kismantoro petrus, peran Bendahara adalah sosok yang seharusnya memegang peran strategis untuk membantu DJP dalam memenuhi target penerimaan pajak. Selain itu peran Bendahara juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana Negara. Beliau mengungkapkan kepatuhan dalam pengelolaan pajak Bendahara Pemerintah menjadi cermin kepatuhan Wajib Pajak sebab dengan telah terpotong dan dipungutnya pajak oleh Bendahara ada banyak Wajib Pajak lainnya seperti Rekanan dan para pegawai yang memungkinkan untuk taat pajak juga (Republikanews,12 Februari 2013).

Kewajiban Bendahara Pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah pemotongan dan/pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (Direktorat Jenderal Pajak, 2011).

Salah satu jenis pajak yang wajib dipungut oleh Bendahara Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai ini timbul saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya dilakukan oleh si penjual atau penerima uang, namun dalam hal untuk mengamankan dan mempercepat pemasukan ke kas Negara, dilakukan sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, pemerintah menentukan badan-badan atau instansi yang harus melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (Setiawan dan Hardi, 2006:91). Penunjukan Bendaharawan

Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003.

Idealnya, sebagai bagian dari pemerintahan, kewajiban Bendaharawan Pemerintah secara otomatis terlaksana seperti apa yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Akan tetapi fakta di lapangan berbicara lain. Berdasarkan wawancara awal dengan narasumber yang merupakan Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura, diketahui bahwa ternyata kewajiban Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai tidak terlaksana seperti yang tertera di Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Ketidaksesuaian kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut terindikasi oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan yang tidak mau jika Bendaharawan yang melakukan pemungutan pajak, padahal di dalam aturannya sudah jelas bahwa yang merupakan wajib pungut ketika timbul Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang dilakukan oleh Bendaharawan dengan Rekanan adalah Bendahara Pemerintah. Hal tersebut tentunya menimbulkan semacam dilema bagi Bendaharawan Pemerintah seperti yang dikatakan berikut ini :

“Disini kami dihadapkan dengan berbagai dilema saat bertransaksi dengan rekanan pemerintah, khususnya terkait dengan pemungutan PPN, saat betransaksi dengan rekanan pemerintah yang sudah PKP, ada saja rekanan yang tidak mau menerima pembayaran barang dengan harga sebelum PPN. Rekanan tersebut beralasan bahwa mereka yang akan menyetorkan pajaknya, namun ketika dimintai SSP, mereka tidak mau memberikan dan menyuruhnya mengambil di KPP” (10 Desember 2014).

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa terdapat ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

antara Bendahara dan Rekanan dengan aturan yang berlaku. Ketidakseragaman tersebutlah yang menjadi pegangan awal peneliti untuk menelaah pemaknaan tiap-tiap pelakon kebijakan tersebut yang selanjutnya dapat digunakan untuk menguak sisi ketidakseragaman pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Hal ini menjadi menarik diteliti karena berdasarkan fakta yang ada, kewajiban Bendaharawan dan Rekanan masih belum terlaksana seperti yang diamanatkan di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003.

Penelitian-penelitian sebelumnya memang sudah ada yang meneliti tentang pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah seperti Solahuddin (2008), membahas mengenai pelaksanaan kebijakan saat pembuatan faktur pajak atas transaksi antara Pengusaha Kena Pajak Rekanan dan Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Ratnafuri (2011), membahas mengenai malpraktek pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Prasetyo (2011), meneliti tentang pemahaman Bendaharawan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22. Hastutie (2013), meneliti tentang mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Pemerintah. Namun, berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang penguakan sisi ketidakseragaman praktik antara Bendaharawan Pemerintah dan Rekanan Pemerintah dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena fenomena diatas dapat diketahui bahwa dalam kenyataannya masih banyak ketidaktertiban Wajib Pajak Bendaharawan maupun rekanan yang belum melakukan pemotongan/ pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah agar lebih memahami tentang pelaksanaan pemungutan/pemotongan pajak sesuai

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menyamakan pemahaman antara Wajib Pajak Bendaharawan dengan Rekanan Pemerintah. Dan bagi Direktorat Jenderal Pajak semoga dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan Wajib Pajak Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Dari latar belakang diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana para pelakon kebijakan memaknai tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan, serta menelaah ketidakseragaman praktik yang terjadi saat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas untuk mendapatkan sebuah pemahaman dan pemaknaan, penelitian ini akan mendalami ketidakseragaman yang terjadi dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan Rekanan. Oleh karena itu maka anggaran yang dipakai untuk kegiatan pembayaran merupakan anggaran yang bersumber dari Negara. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana para aktor ini memaknai tentang penunjukan Bendahara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai? Pertanyaan inilah yang nantinya akan menguak secara mendalam tentang ketidakseragaman yang dilakukan oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemaknaan atau pandangan para aktor yang nantinya dapat menguak sisi ketidakseragaman yang terjadi di lapangan terkait penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian diatas maka batasan penelitian ini adalah hanya mencari tahu bagaimana pemaknaan para aktor tentang penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan

menelaah ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai antara Wajib Pajak Bendahara dan Rekanan Pemerintah.

### **Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kalangan terkait yaitu :

1. Bagi Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah agar lebih memahami tentang pelaksanaan pemungutan/pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menyamakan pemahaman antara Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dengan Rekanan Pemerintah.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan Wajib Pajak Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah serta bisa meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah.

3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang serupa.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Creswell (2013), studi fenomenologi merupakan studi yang berusaha mencari “esensi” makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Studi fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu

terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif dalam banyak hal juga disebut sebagai paradigma konstruktif, yang menekankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memahami realitas dunia apa adanya (Ludigdo, 2013) dalam (Rohma, 2015).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Situs penelitian ini dilakukan di Universitas Trunojoyo Madura di bagian Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang beralamat di Jalan Raya Telang Kamal Bangkalan Madura. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah para informan yang memang memiliki jabatan terkait dengan bidang Pajak Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah di Kabupaten Bangkalan. Menurut Mukhtar (2013 :100) data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informen) melalui proses wawancara. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan informan pada obyek penelitian, selain itu peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan yakni di Biro Administrasi Umum Dan Keuangan Universitas Trunojoyo Madura, Rekanan-rekanan Pemerintah Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

Menurut Mukhtar (2013 : 101) data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah artikel dari internet, dokumen berupa faktur pajak serta surat setoran pajak, struktur organisasi, dan gambaran umum tempat penelitian, dan literatur-literatur terkait yaitu dari peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh

Bendaharawan dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya, Undang undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini menggunakan 7 informan. Informan yang pertama yaitu Bendahara Pengeluaran pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Informan yang kedua yaitu Bapak Nugroho selaku Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan dan Informan yang selanjutnya yaitu dari kalangan Rekanan Pemerintah.

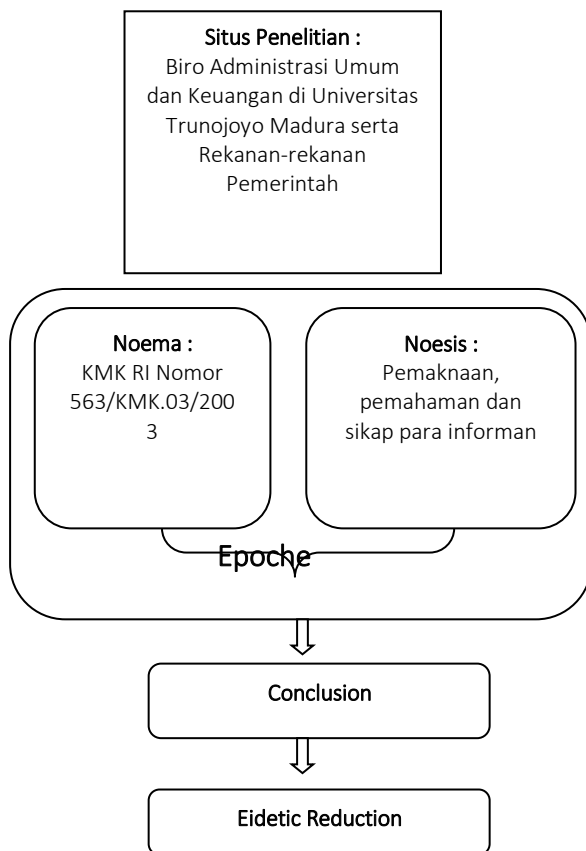
Hal pertama yang dilakukan dalam proses analisis data dengan menggali data normatif yang diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu tentang prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara sebagai pemungut berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 yang kemudian dievaluasi dan dianalisis untuk menemukan isu-isu penelitian.

Langkah selanjutnya adalah pemilihan data empiris hasil pengamatan pada situs penelitian di Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Trunojoyo Madura serta Rekanan-rekanan selaku penyedia barang dan jasa dan juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Pada langkah ini akan dilakukan pengolahan data dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan terpilih yaitu dari Bendahara Pengeluaran di BAUK Universitas Trunojoyo Madura, Admin atau pemilik toko yang menjadi rekanan serta Account

Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

Selanjutnya, Dari kedua tahapan tersebut, akan menggambarkan sebuah kerangka penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa langkah, langkah-langkah tersebut peneliti adopsi dari Kuswarno (2013: 40-44) dalam Puspitasari (2012) langkah yang perlu dilakukan dalam metode fenomenologi meliputi *intention analysis*, *epoche*, dan *eidetic reduction*. Langkah awal peneliti melakukan *intentional analysis* dengan menggabungkan *noesis* yang merupakan pemahaman subjektif para informan terkait pengalaman pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan *noema* yang merupakan objek yang dipersepsikan informan yang meliputi nota pembelanjaan, faktur pajak, surat setoran pajak, sosialisasi, pengawasan dll. Tahap kedua yaitu tahap *epoche* yang merupakan gabungan dari *noesis* dan *noema* untuk peggalian data informan.

Selanjutnya yaitu *eidetic reduction* yang merupakan tahap penguraian dan pengungkapan realita yang telah diperoleh pada tahap *epoche* untuk menemukan intisari dari fenomena di lapangan. Intisari tersebut akan diungkap mengenai pemahaman dan pemaknaan berdasarkan fenomena di lapangan. Berikut adalah kerangka teknik analisis data dalam penelitian ini :



**Gambar 1 :Kerangka Teknik Analisis Data**

### **MEMAHAMI FUNGSI DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PEMERINTAH**

Menurut Sialagan dan Lubis (2002:38) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 1 ayat (27) adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada

bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 1 ayat (1) Bendaharawan Pemerintah disini adalah Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 1 ayat (2) Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa kontruksi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas keamanan. Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah pasal 7 ayat (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat (1) tarif untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah 20% dan paling tinggi 200 %.

### **Pembayaran yang tidak dipungut PPN oleh Bendaharawan**

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya pasal 4 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah yaitu a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, b) Pembayaran untuk pembebasan tanah, c) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, d) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero), e) Pembayaran atas rekening telepon, f) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, g) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **Dasar dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003, dasar pemungutan PPN adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. Tata cara pemungutannya PKP Rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN. Surat Setoran Pajak yang dimaksud diisi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah

yang bersangkutan, tetapi penandatanganan Surat Setoran Pajak dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai penyetor atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangkap tiga. Lembar pertama untuk Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Lembar kedua untuk arsip Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah dan lembar ketiga untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPKN. Pada setiap lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal....." dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangkap 5 (lima). Setelah PPN disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, maka lembar pertama untuk Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara. Lembar ketiga untuk Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan lembar kelima untuk arsip Bendaharawan Pemerintah. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai diwajibkan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan terdaftar dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai" yang dibuat dalam rangkap 3 paling lambat 20 hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan. Lembar pertama dilampiri Faktur Pajak lembar ketiga untuk Kantor Pelayanan Pajak. Lembar kedua untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara serta lembar ketiga untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.

## **KETIDAKSERAGAMAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARAWAN DAN REKANAN PEMERINTAH**

Ketidakseragaman yang dilakukan oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003. Bentuk-bentuk ketidakseragaman tersebut adalah sebagai berikut:

### **1) Penentuan dasar pengenaan pajak yang melebihi nilai seharusnya.**

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunjoyo Madura tidak seragam dengan apa yang ada dalam aturan yang berlaku. Hal ini ditengarai oleh pihak rekanan yang tidak mau menerima jumlah sebelum pajak, rata-rata rekanan menerima pembayaran sejumlah harga yang sudah termasuk pajak sehingga Bendahara menjadikan jumlah tersebut sebagai dasar pengenaan pajak.

Namun ketika dihadapkan dengan Rekanan yang seperti itu, Bendahara tidak mau ribet dengan urusan toko. Karena tetap ingin menjalankan kewajibannya sebagai pemungut pajak maka mereka tetap melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan menjadikan nilai yang tertera dalam kuitansi tersebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak seperti yang bisa kita lihat dari wawancara berikut ini :

“Ketika dihadapkan dengan kasus semacam itu, karena kita gak mau ribet-ribet dengan urusan toko, maka kami disini tetap melakukan pemungutan pajak dengan menjadikan nilai yang tertera dalam kuitansi tersebut sebagai DPP. Yang penting kewajiban kita sebagai wajib pungut pajak sudah terlaksana. Entah mereka nanti nyetor lagi atau tidak, jika mereka nyetor juga maka akan timbul pajak ganda”.

Penentuan Dasar Pengenaan Pajak versi Bendahara Pengeluaran ketika dalam kuitansi tertera nilai Rp 11.000.000 (yang seharusnya sudah termasuk pajak) namun

Bendahara menetapkan Rp.11.000.000 sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Sehingga Rekanan tetap dibayar 11.000.000 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Rp. 11.000.000 yaitu Rp 1.100.000 jadi total pembelanjaan ditambah pajak menjadi Rp.12.100.000.

Contoh perhitungan versi Bendahara Pengeluaran :

Jumlah pembayaran di kuitansi Rp  
11.000.000

PPN yang dipungut Bendahara:

**10% x DPP**

10% x **Rp 11.000.000**

Rp 1.100.000

Jumlah yang dibayarkan kepada

PKP rekanan pemerintah

Rp.11.000.000

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003) pada lampiran II dituliskan bahwa: Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :

Jumlah pembayaran

Rp 11.000.000

PPN yang harus dipungut:

10:110 x Rp.11.000.000

Rp 1.000.000

**Jadi DPP sebesar**

**Rp.10.000.000**

**PPN 10% X Rp.10.000.000**

**Rp.1.000.000**

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa untuk penetapan Dasar Pengenaan Pajak oleh Bapak Arif ini melebihi dari nilai yang seharusnya. Hal ini disebabkan bukan karena Bapak Arif tidak paham dengan penetapan Dasar Pengenaan Pajak, tapi dikarenakan Rekanan tersebut tidak mau menerima harga sebelum pajak. Berhubung Bapak Arif tetap ingin melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pungut, maka Bapak Arif tetap memungut pajak dengan menetapkan harga yang ada di kuitansi tersebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak.



## 2) Pembuatan faktur pajak dan surat setoran pajak yang diwakili oleh Bendahara.

Terkait bukti potong, penerbitan faktur pajak yang timbul saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak ini untuk faktur pajak harusnya dari pihak Rekanan, namun dari hasil temuan di lapangan bahwa Rekanan hanya memberikan nomor faktur kepada Bendahara, bahkan ada Rekanan yang tidak mau memberikan nomor faktur ketika Bendahara memintanya. Seperti yang disampaikan oleh saudara Eva selaku admin di toko Tom & Jerry sebagai berikut :

“Gak ada, jadi kita gak ngluarin Pajak Pertambahan Nilai ke instansi tersebut karena kita anggepnya itu instansi sama kayak pembeli lain. Cuma misal dari instansi itu minta stempel ya kita kasih untuk menguatkan yang di nota itu”.

Terkait bukti potong yang timbul saat transaksi tersebut, saudara Anggi yang menjadi Admin di Toko Cerelia di Toko Tom & Jerry menyampaikan hal berikut :

“Untuk bukti potong itu kan biasanya dari kedua belah pihak, dari yang memotong dan dipotong. Biasanya yang memotong itu yang ngasih bukti terus kita dikasih misalnya ada 2 lembar, terus kita dikasih yang asli, mereka punya kopinya, dua-duanya itu bisa dilaporkan, agar dua-duanya kroscek apa benar ada pemotongan sekian dari instansi, ya sama-sama nyetor cuma yang memotong itu yang aslinya, kita cuma nyetor laporan bahwa sudah terpotong. Jadi instansi yang bikin”.

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara Novi selaku admin di toko Serelia sebagai berikut :

“Kalau dari instansi belanja bulanan 20 juta gitu ya mbak, terus minta nomor faktur, kita gak mau kasih nomor faktur kita. Jadi, meskipun instansi melakukan pembelian sejumlah 20 juta kita tolak. Gak tau instansi itu kemudian beli dimana”.

Namun ada juga pernyataan dari Rekanan yang bisa diajak kompromi seperti

yang disampaikan Pemilik Toko Abel berikut ini :

“Kalau dari kampus melakukan pembelian banyak kayak gitu, biasanya nanti bedanya kita ngasih nomor faktur ke mereka”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas terlihat bahwa terdapat toko yang tidak mau menyerahkan nomor faktur ke pihak instansi, bahkan menolak pembelanjaan ketika pihak instansi melakukan pembelanjaan dan meminta faktur, namun tetap ada dari instansi yang tetap belanja diatas satu juta tanpa meminta nomor faktur. Hal ini berarti ada instansi yang tetap belanja kemudian nilai pembelanjaannya tersebut dijadikan Dasar Pengenaan Pajak. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pajak ganda.

Berdasarkan pernyataan para informan tersebut, dapat kita ketahui bahwa di lapangan yang membuat faktur pajak ini kebanyakan masih Bendaharawan Pemerintah, rata-rata untuk toko yang *manut* dengan Bendahara itu hanya memberikan nomor faktur saja.

## 3) Pembayaran kepada rekanan melebihi jumlah yang seharusnya.

Seharusnya Rekanan tidak dibayar dengan harga termasuk pajak oleh Bendahara. Bendahara harusnya memberikan pengertian bahwa ketika bertransaksi dengan Bendahara Pemerintah, maka yang menjadi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah.

Contoh perhitungan untuk pembayaran kepada Rekanan versi Bendahara Pengeluaran :

Jumlah pembayaran di kuitansi

Rp 11.000.000

PPN yang harus dipungut:

10 % x Rp.11.000.000 Rp  
1.100.000

**Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan pemerintah**

**Rp.11.000.000**

Jumlah PPN yang disetorkan Rp.  
1.100.000

**Jumlah pembayaran+PPN**

**Rp.12.100.000**

**Versi Bendahara**

Jumlah lebih bayar kepada Rekanan tersebut dikarenakan pada kenyataan di lapangan masih banyak Rekanan yang kurang paham terhadap penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, mereka tidak membedakan antara Bendahara dengan konsumen yang lain. Padahal di aturannya sudah dijelaskan bahwa Bendahara menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai saat Bendahara yang menjadi konsumen.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak hanya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :

Jumlah pembayaran	Rp
11.000.000	
PPN yang harus dipungut:	
$10:110 \times \text{Rp.1.100.000}$	Rp
<u>1.000.000</u>	

**Jumlah yang dibayarkan  
kepada PKP rekanan  
pemerintah  
Rp.10.000.000**

#### **Versi KMK RI NO 563/KMK.03/2003**

Padahal dalam aturannya, ketika nilai belanja di kuitansi sebesar 11.000.000, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang memakai rumus  $10:110 \times \text{Rp.11.000.000}$ , sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang disetor Rp.1.000.000 sehingga rekanan itu dibayar Rp.10.000.000. Namun dalam praktiknya, rekanan tetap dibayar Rp 11.000.000 padahal harusnya rekanan dibayar 10.000.000. Mengingat bahwa Bendaharawan Pemerintah disini yang menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dikarenakan Rekanan Pemerintah tidak mau menerima pembayaran dengan nilai belanja sebelum kena pajak. Mereka rata-rata meminta pembayaran sesuai nilai belanja di kuitansi meski nilai yang tertera di kuitansi tersebut sudah termasuk pajak. Akibatnya nilai yang tertera di kuitansi tersebut dijadikan sebagai Dasar Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah, jadi Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh Bendaharawan Pemerintah ini tidak sama

dengan Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh Rekanan Pemerintah. Seharusnya Rekanan tidak dibayar dengan harga termasuk pajak oleh Bendahara. Bendahara harusnya memberikan pengertian bahwa ketika bertransaksi dengan Bendahara Pemerintah, maka yang menjadi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah.

Dari hasil temuan dan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa ketidaksesuaian pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Pemerintah atas kewajiban perpajakan bukan semata-mata karena mereka tidak paham akan kewajibannya namun, pihak ketiga atau Rekanannya yang tidak paham akan penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

#### **PEMAKNAAN TIAP-TIAP AKTOR TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PEMERINTAH**

Berdasarkan fakta di lapangan didapat simpulan dari pemaknaan dari tiap-tiap pelakon. Pertama yaitu dilema Bendaharawan “tau kalau salah tapi tetap ingin melaksanakan kewajiban”. Ada semacam dilema lain yang dirasakan oleh Bendaharawan seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya bahwa saat bertransaksi dengan rekanan pemerintah khususnya terkait pemungutan pajak pertambahan nilai ada saja yang tidak mau menerima pembayaran barang dengan harga sebelum pajak. Namun ketika dihadapkan dengan Rekanan yang seperti itu, Bendahara tidak mau ribet dengan urusan toko. Karena tetap ingin menjalankan kewajibannya sebagai pemungut pajak maka mereka tetap melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan menjadikan nilai yang tertera dalam kuitansi tersebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak seperti yang bisa kita lihat dari wawancara berikut ini :

“Ketika dihadapkan dengan kasus semacam itu, karena kita gak mau ribet-ribet dengan urusan toko, maka kami disini tetap melakukan pemungutan pajak dengan menjadikan

nilai yang tertera dalam kuitansi tersebut sebagai DPP. Yang penting kewajiban kita sebagai wajib pungut pajak sudah terlaksana. Entah mereka nanti nyetor lagi atau tidak, jika mereka nyetor juga maka akan timbul pajak ganda”.

Dari uraian di atas terlihat bahwa sebenarnya Bendahara sudah memahami akan kewajibannya dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai namun dikarenakan pihak ketiga yang tidak mau menerima pembayaran sebelum pajak jadi pemungutan pajak tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003. Meski tau bahwa pemungutan tersebut tidak sesuai dengan aturannya namun bendahara tetap melakukan pemungutan karena beliau tau bahwa bendahara adalah pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Selanjutnya simpulan pemaknaan dari para rekanan yaitu “ketidaktahuan rekanan tentang penunjukan Bendahara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”, masih banyak Rekanan Pemerintah yang tidak tahu dan tidak paham tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Kebanyakan dari rekanan-rekanan tersebut masih menganggap bahwa mereka adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam pasal 2 (1) disebutkan bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai informan kunci untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai versi Rekanan, maka yang dijadikan informan adalah Pemilik Toko, Admin dan juga penjaga Toko-toko yang ada di Bangkalan yang tentunya juga menjadi Rekanan Pemerintah. Dari hasil

temuan di lapangan ternyata masih banyak Rekanan Pemerintah yang belum paham tentang penunjukan Bendaharawan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai jika Bendahara Pemerintah yang melakukan transaksi dengan Rekanan. Para rekanan ini masih menganggap bahwa rekananlah yang menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai meski Bendahara yang menjadi konsumen. Seperti yang disampaikan oleh saudari Novi yang menjadi Admin di Toko Cerelia berikut ini :

“Tidak ada perlakuan yang berbeda dengan pembeli lainnya, meskipun pembelian diatas 2 juta tetap 2 juta bayarnya sama kayak pembeli lainnya. Kalau dari instansi belanja bulanan 20 juta gitu ya mbak, terus minta nomor faktur, kita gak mau kasih nomor faktur kita. Jadi, meskipun instansi melakukan pembelian sejumlah 20 juta kita tolak. Gak tau instansi itu kemudian beli dimana. Tapi ya tetap ada yang beli 2 juta gitu mbak tapi gak minta nomor faktur kami”.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh saudara Anggi :

“Gak ada perlakuan yang berbeda antara Bendaharawan Pemerintah dengan *customer* lain, sama seperti yang lain, kalau mbak ini yang beli langsung harga itu didalamnya sudah *include* Pajak Pertambahan Nilai jadi ya Bendahara juga sama seperti itu. Bedanya mungkin mereka itu bawa kuitansi dan minta stempel ke kita ya kita kasih tapi di kroscek dulu harga yang di nota tadi itu sama atau tidak dengan yang tertera di kuitansi. Tapi pembayarannya kesini ya tetep bayar sesuai pembelanjaan”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak Rekanan Pemerintah yang tidak tahu dan tidak paham tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Kebanyakan dari rekanan-rekanan tersebut masih menganggap bahwa mereka adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPKN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam pasal 2 (1) disebutkan bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Artinya, Pajak Pertambahan Nilai yang biasanya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan jika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, hal ini menjadi berbeda perlakuan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah maka yang menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan Rekanan Pemerintah tentang penunjukan Bendahara Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau memang dari Toko/Rekanan tersebut tidak mau jika Bendahara yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Namun yang dapat peneliti tangkap saat wawancara dengan saudari Novi sebagai admin di Toko Cerelia, beliau seakan memang tidak tahu kalau seharusnya ada perlakuan yang berbeda ketika Bendahara Pemerintah atau pihak dari instansi melakukan pembelian maka Bendahara yang menjadi pemungut. Pada saat Bendahara atau pihak instansi meminta nomor faktur untuk keperluan dokumen-dokumen Bendahara, pihak rekanan tidak mau memberikan nomor faktur tersebut karena mereka menganggap bahwa ketika ada dari pihak instansi belanja bulanan pada toko tersebut kemudian mereka meminta nomor faktur itu berarti pihak tokolah yang membayar pajak yang seharusnya dibayar oleh instansi. Hal ini bisa terlihat dari kutipan wawancara berikut ini :

“Kalau dari instansi belanja bulanan 20 juta gitu mbak, terus mereka minta nomor faktur kita, kya gak mau kasih nomor faktur kita. Jadi, meskipun instansi melakukan pembelian

sejumlah 20 juta kita tolak. Gak tau instansi itu kemudian beli dimana”

Kemudian ketika peneliti bertanya mengapa saudari Novi tidak memberikan nomor faktur saat dimintai oleh pihak instansi, saudari Novi menjawab sebagai berikut :

“Karena mereka meminta nomor faktur itu maksudnya kan pajaknya mereka kami yang suruh bayarkan, tapi kami ya gak mau juga. Soalnya mereka yang belanja, tapi kami yang dikenakan pajak, kan nomor faktur kami dicantumkan ke mereka, ke pajaknya. Berarti kan kami yang bayarkan pajaknya mereka ketika mereka belanja, otomatis kan toko ini yang kena pajaknya , padahal kan bukan kami yang belanja, kecuali kami belanja sendiri untuk kula'an ya kami kasih nomor faktur kami karena kami yang belanja untuk dijual kembali”

Ketika peneliti mencoba bertanya bahwa yang seharusnya menjadi pemungut jika Bendahara yang beli bukankah Bendaharalah yang menjadi pemungut, kemudian saudari novi mengatakan sebagai berikut :

“Oh gak tau ya mbak kalau seharusnya Bendahara yang mungut pajaknya, yang saya tau ketika pajak itu dibayar maka semuanya beres”

Dapat diketahui bahwa dari uraian dan pernyataan para rekanan, masih banyak rekanan yang tidak mengetahui adanya aturan tentang penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Mereka menganggap bahwa mereka tetaplah pemungut Pajak Pertambahan Nilai meskipun yang menjadi konsumen.

Selanjutnya yaitu tanggapan dari *Account Representative*. *Account Representative* di Kantor Pelayanan pajak juga merupakan pihak yang menjadi informan kunci untuk menguak sisi ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara. Bapak Nugroho selaku *Account Representative* dirasa dapat mewakili untuk dijadikan informan yang merupakan

pihak konfirmatif. Tugas *Account Representative* sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 diantaranya menyatakan bahwa seorang *Account Representative* bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak dan untuk bimbingan, himbauan, dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak. Realitas yang terjadi senyatanya di lapangan ini dirasa perlu untuk dikonsultasikan kepada pihak *Account Representative* untuk mengetahui bagaimana tanggapan serta bentuk-bentuk pengawasan maupun sosialisasi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Saat diwawancarai, *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan mengatakan bahwa pemungut pajak pertambahan nilai yang terutang atas transaksi antara Bendahara Pemerintah dan Rekanan ini yang menjadi pemungut adalah Bendahara Pemerintah seperti yang tertera dalam wawancara berikut ini :

“kalau di aturannya yang menjadi pemungut saat Rekanan bertransaksi dengan bendahara maka yang menjadi pemungut adalah bendahara”

Sudah jelas dalam aturannya bahwa yang menjadi pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendahara namun dalam praktiknya masih banyak toko-toko yang menjadi Rekanan Pemerintah masih tetap memungut pajak yang seharusnya Bendahara yang memungut. Pajak ganda terjadi saat dari kedua belah pihak sama-sama memungut kemudian dari kedua pihak tersebut sama-sama menyeter. Ketika ditanyai tanggapan tentang hal ini Bapak Nugroho selaku *Account Representative* menyatakan hal berikut ini:

“harusnya yang mungut bendahara, kalau tokonya meminta pembayaran penuh (termasuk pajak) maka tinggal dikasih pengertian aja bahwa yang harusnya menjadi pemungut ketika Bendahara yang menjadi pembeli yaitu Bendahara. Kalau tetap tidak mau yasudah pokoknya Bendahara harus mungut”

Sebuah kalimat yang saya garis bawahi “pokoknya Bendahara harus mungut”, dari pernyataan ini seolah-olah memang hal-hal seperti itu dibiarkan saja oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak. Memang benar bahwa dengan timbulnya pajak ganda maka tidak ada ruginya kepada Negara karena yang terjadi bukanlah Pajak Kurang bayar, namun Pajak lebih Bayar. Namun jika kedua belah pihak ini sama-sama memungut maka apa gunanya aturan-aturan tersebut dibuat. Bukankah lebih baik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ini lebih baik dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan saja.

Terkait tugas dalam hal sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Bangkalan sudah dilaksanakan, namun berdasarkan wawancara dengan para para rekanan dan Bendahara dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi tersebut belumlah optimal karena dalam hal sosialisasi tidak dilakukan sosialisasi secara bersamaan antara bendahara dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan. Padahal dengan diadakan sosialisasi secara bersamaan tersebut dapat menyatukan pemahaman antara Bendahara dan Rekanan. Serta dapat langsung berdiskusi atau tanya jawab saat ada permasalahan atau kendala dengan pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya masih banyak Rekanan yang tidak sepemahaman dengan Bendahara. Akibat dari beda pemahaman tersebut justru akan menimbulkan bentrok argumen antara Bendahara dan Rekanan yang akan menimbulkan kendala-kendala lain dalam praktik di lapangan.

Pengawasan yang dilakukan juga masih belum optimal. Pengawasan yang dilakukan itu sudah dilakukan namun masih longgar. Tujuan ditunjuknya Bendahara sebagai wajib pungut pajak ini sebenarnya untuk mempercepat arus penerimaan kas Negara lewat pajak yang mereka pungut tersebut. Namun ketika kita lihat praktik di lapangan bahwa banyak hal-hal yang dimaklumi meski dalam praktiknya tidak sama dengan aturan Undang-undang.

## **MINIMNYA KOMUNIKASI ANTARA BENDAHARA, REKANAN PEMERINTAH DAN FISKUS PAJAK**

Penunjukan Bendahara sebagai pemungut pajak ini sebenarnya untuk mempercepat pemasukan ke kas negara. Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan dengan rinci siapa yang memungut, menyetor dan melaporkan dan juga tata cara penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak juga sudah disebutkan dengan rinci. Namun apakah arti dari semua tulisan dan aturan tersebut jikalau aturan tersebut kurang dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut tidak tahu-menahu tentang keberadaannya. Bentuk komunikasi itu berupa sosialisasi kepada Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah.

Berawal dari sebuah aturan yang dibuat tanpa sosialisasi yang gencar justru hanya akan menimbulkan berbagai macam kendala seperti ketidakseragaman dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Bendahara saat melakukan transaksi dengan Rekanan. Maka dari sinilah muncul istilah Bendahara dan Rekanan yang tidak patuh. Padahal Bendahara tersebut menjadi tidak patuh karena pihak ketiganya atau Rekanannya menolak jika Bendahara yang akan menjadi pemungut pajak ketika bertransaksi. Penyebab Rekanan yang melakukan penolakan tersebut karena Rekanan tidak paham atau bahkan tidak tahu ketika bertransaksi dengan Bendahara Pemerintah maka mekanisme menjadi berbeda yaitu Bendahara yang menjadi pemungut. Seharusnya ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu maka Bendahara memberikan pengertian kepada Rekanan dengan menjelaskan bahwa yang menjadi pemungut adalah Bendahara.

Layaknya sebuah pisau yang tidak diasah, maka kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk Bendahara tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Berawal dari sebuah aturan yang seolah ada dan tiada membuat semakin banyak kendala-kendala dalam praktiknya di lapangan. Sang Bendahara tetap

melakukan kewajibannya sebagai pemungut pajak meskipun tidak sesuai aturan yang berlaku, di lain sisi sang Rekanan juga melakukan pemungutan pajak meskipun sudah jelas dalam KMK RI No.563 Tahun 2003 tentang Penunjukan Bendahara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Jika sudah seperti ini maka hendaknya pembuat aturan terlebih dahulu memberikan pedoman yang pas bagi pihak-pihak yang terlibat dan menguatkannya dengan menggencarkan sosialisasi bagi pihak-pihak terlibat agar tidak terjadi beda pemahaman antar pihak-pihak yang terlibat yang tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang muncul nantinya. Jadi jika sudah sama-sama tahu dan sepemahaman tentunya akan lebih mudah dalam pelaksanaannya sehingga aturan tersebut mampu mencapai tujuan dan memberikan kepastian hukum.

Jika kita lihat lagi praktik senyatanya di lapangan, maka sebenarnya sebuah aturan tersebut tidaklah berarti jika tanpa sebuah sosialisasi dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat, bukankah peraturan tersebut hanya akan menjadi sebuah selembar kertas yang niat awalnya dijadikan pedoman pihak-pihak yang terlibat?

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif selaku Bendaharawan Universitas Trunojoyo Madura sebagai berikut :

“Berarti dari aturannya yang gak sip ni, disitu dituliskan Bendahara sebagai wajib pungut tanpa menyebutkan tekhniknya secara lanjut”.

Padahal sebenarnya sudah ada peraturan atau kebijakan penunjukan bendahara sebagai pemungut pajak beserta tekhniknya yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Namun, mungkin saja Bendahara tersebut memang tidak tahu bahwa sebenarnya ada sebuah pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Seperti yang disampaikan oleh beliau sebagai berikut :

“Saya lupa peraturan nomor berapa itu pokoknya disitu hanya dituliskan bahwa Bendahara Pemerintah merupakan wajib Pungut atas pajak,

disitu kan dari aturannya jadi ngambang”.

Dari hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa peran fiskus untuk mensosialisasikan peraturan atau kebijakan tersebut masih kurang dan tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak terkait. Seolah-olah ruh dalam kebijakan ini hilang karena kurangnya sosialisasi dan longgarnya pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam praktiknya antara bendahara dan Rekanan Pemerintah ini memang memiliki perbedaan pemahaman yang bisa memunculkan bentrok argumen dari keduanya. diantaranya penentuan Dasar Pengenaan Pajak serta siapa yang memungut pajak dan membuat fakturnya. Bendahara berpedoman dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 pasal 5 (1) yang menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu merupakan wajib pungut atas pajak yang timbul karena adanya pembayaran Uang Persediaan. Jadi setiap transaksi yang timbul pajak terutang, maka Bendahara wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak tersebut.

Namun berbeda dengan versi Rekanan yang justru tidak paham dan bahkan tidak tahu bahwa ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak maka Bendaharalah yang dijadikan sebagai Pemungut Pajak. Sehingga dalam praktiknya, perbedaan pemahaman antara Bendahara dan Rekanan inilah yang menyebabkan ketidakseragaman praktik antara Bendahara dan Rekanan Pemerintah dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Dan dari hal inilah maka ketidakseragaman lainnya bisa terjadi. Karena ketidaktauhan Rekanan bisa menyebabkan Rekanan menolak jika Bendahara yang memungut Pajak Pertambahan Nilai, dan karena alasan tidak mau ribet dengan urusan Toko-toko seperti itu maka Bendahara memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan Jumlah pembayaran di kuitansi atau nota sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Dari hasil temuan juga terdapat Rekanan yang tidak mau ketika Bendahara meminta Nomor Faktur Rekanan, pemahaman mereka bahwa ketika mereka memberikan Nomor Faktur Toko, maka Toko yang akan membayar pajaknya Bendahara tersebut. Padahal tidak, Bendahara meminta nomor faktur tersebut untuk keperluan dokumen dokumen lengkap untuk kewajibannya sebagai pemungut pajak, yang juga berkewajiban menyetor dan melaporkan pajak.

### **Komunikasi dalam Bentuk Sosialisasi**

Selama ini penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan atau apapun namanya dalam rangka memberikan edukasi perpajakan kepada Bendahara tidak selalu menyertakan Rekanan Pemerintah (Pengusaha Kena Pajak) untuk duduk bersama dalam satu acara perpajakan. Padahal pengusaha rekanan selaku pihak penyedia barang dan jasa kepada instansi pemerintah seharusnya sepaham dengan bendahara yang memungut/memotong pajak atas transaksi pengeluaran belanja yang dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD.(Pajak.go.id, 31 Desember 2013)

Seperti yang disampaikan oleh Bendaharawan Universitas Trunojoyo Madura bahwa untuk sosialisasi tentang kewajiban perpajakan Bendahara belum pernah diadakan sosialisasi secara bersamaan antara Bendahara dan Rekanan terkait kewajiban perpajakan saat mereka melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak. Pihak KPP biasanya mengadakan sosialisasi dengan mengundang Wajib Pajak Rekanan ataupun Bendahara namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Sosialisasi biasanya dibedakan antara Bendahara dan Rekanan Pemerintah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nugroho selaku *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan yaitu :

“Iya pernah, sosialisasi untuk bendahara di tahun 2015 ini sudah 2 kali untuk semua kewajiban perpajakannya bendahara. Kan ada

PPh pasal 21,22,23, pasal 4(2) dan PPN. Jadi itu disosialisasikan dalam satu acara tidak hanya fokus pada satu jenis pajak karena kalau cuma satu pajak saja itu sangat singkat. Jadi kita bahas semua itu dalam satu acara. Agar dalam satu acara tersebut bisa mempelajari tidak hanya satu jenis pajak saja. Kalau untuk pengusaha kena pajaknya beda lagi, sosialisasinya tidak bareng dengan Bendahara. Biasanya kita undang mereka kesini”.

Pernyataan Bendahara Pengeluaran terkait sosialisasi adalah sebagai berikut :

“Dulu pernah, terakhir tahun 2011 apa 2010 gitu, sosialisainya tentang kewajiban perpajakan bendahara. Untuk lebih detailnya saya kurang tau karena waktu itu saya belum disini mbak, tapi setelah itu sampai sekarang belum pernah lagi. Kalau yang baru-baru ini tentang *e-filling* itu mbak”.

Berikut yang disampaikan Rekanan terkait sosialisasi :

“Kalau ada undangan, kita ya datang. Pastinya dari kantor pajak sini kita dapet penyuluhan ya kita datang perwakilan”.

Lain lagi yang disampaikan oleh saudari Novi berikut ini :

“Gak pernah ada mbak untuk sosialisasi seperti itu”.

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak yang terlibat belum optimal. Belum adanya sosialisasi antara pihak-pihak yang secara bersamaan dalam satu acara ini yang membuat terputusnya komunikasi antara Bendaharawan, Rekanan serta Fiskus Pajak. Padahal dengan diadakan sosialisasi secara bersamaan tersebut dapat menyatukan pemahaman antara Bendahara dan Rekanan. Serta dapat langsung berdiskusi atau tanya jawab saat ada permasalahan atau kendala dengan pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya

masih banyak Rekanan yang tidak sepemahaman dengan Bendahara. Akibat dari beda pemahaman tersebut justru akan menimbulkan bentrok argumen antara Bendahara dan Rekanan yang akan menimbulkan kendala-kendala lain dalam praktik di lapangan.

Dilema-dilema yang muncul seperti yang dikatakan oleh Bendaharawan Universitas Trunojoyo Madura tersebut tentunya berawal dari perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat yaitu Bendaharawan dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan. Perbedaan pemahaman ini bisa disebabkan oleh kurangnya sebuah sosialisasi kebijakan yang dilakukan dari pihak fiskus atau mereka ini memang tidak mau tahu atas kebijakan tersebut (bisa jadi sudah tau tapi tidak melaksanakan). Dari situlah semuanya berawal. Dilema siapa yang memungut, penetapan Dasar Pengenaan Pajak yang berbeda, serta potensi timbulnya pajak ganda dan masalah-masalah lain yang muncul ini awalnya dari kurangnya sosialisasi tersebut.

Maka dari itu, sebaiknya sebagai pembuat kebijakan hendaknya setelah kebijakan tersebut dibuat, maka agar kebijakan tersebut mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan komunikasi yang *intens* dengan pihak-pihak terlibat. Mengingat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Bendaharawan Pemerintah dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan, maka sebaiknya saat melakukan sosialisasi ini pihak penyelenggara sosialisasi ini mengundang Bendaharawan Pemerintah dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan sekaligus dalam suatu acara, sehingga pada saat sosialisasi berlangsung, kedua belah pihak tersebut dapat mengetahui kewajibannya masing-masing serta melakukan diskusi antara Bendaharawan dengan Pengusaha Kena Pajak Rekanan melalui tanya jawab atas kendala-kendala atau pemasalahan yang menjadi dilema selama ini. Dari sini diharapkan bahwa akan lebih tercipta keseragaman antara praktik yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, Pengusaha Kena pajak Rekanan dengan aturan



perpajakan yang berlaku. Dan agar nantinya tidak terjadi bentrok argumen antara kedua pihak tersebut yang akan menghambat lancarnya proses kegiatan tersebut.

### **BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN DARI PIHAK FISKUS KEPADA BENDAHARAWAN DAN REKANAN**

Dunia yang terus berkembang juga menimbulkan banyak perubahan dalam sistem perpajakan, Dalam dunia perpajakan, perkembangan yang terjadi seperti sistem pemungutan pajak hanya mengenal sistem Official Assesment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, maka seiring dengan waktu, untuk mencegah penghindaran pajak yang mungkin terjadi dengan pemberlakuan sistem tersebut, maka berkembang pula sistem pemungutan pajak lainnya seperti halnya Self Assesment dan Sistem Witholding. Namun secara asas, patut diperhatikan bagaimana kekurangan dan kelebihan sistem tersebut seperti pengawasan dalam praktik langsungnya di Lapangan.

Menurut Bpk Arif selaku Bendahara di Universitas Trunojoyo Madura yaitu :

“Terkait dilema yang seperti perbedaan dasar pengenaan pajak dan juga timbulnya pajak ganda dalam pemeriksaan audit, rata-rata hal-hal seperti itu dimaklumi karena mekanisme yang seperti itu harusnya yang perlu dipikirkan oleh pengambil kebijakan. bagaimana secara teknis di lapangan kan gak bisa seperti itu”.

Pernyataan lain yang disampaikan oleh saudara Anggi selaku admin keuangan di Toko Tom & Jerry yaitu :

“Pastinya ada pengawasan, dari pihak Kantor Pelayanan Pajak itu kesini. Kalau kita kan untuk pelaporannya tiap bulan, pemeriksaan itu per satu tahun ada pemeriksaan bulan april”.

Pernyataan saudara Novi selaku admin di Toko serelia yaitu sebagai berikut:

“Ada, paling kalau untuk itu langsung ketemu dengan bosnya ngomong

masalah pajak yaudah itu aja, Cuma untuk secara detail itu gak ada”.

Terkait masalah pengawasan ini, Bapak nugroho selaku *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan menyampaikan :

“Kalau di bendaharanya itu kan ada DIPA dan SP2D terkait mekanisme pencairan ya kita ngawasannya darisitu. Kalau dari tokonya itu sama kita awasi juga kayak bendahara cuma beda mekanismenya. Bedanya itu kalau bendahara itu terkait pencairan mekanisme keuangannya, kalau dengan tokonya nanti kan kita bisa awasi melalui dokumen-dokumen bendahara”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan itu sudah dilakukan namun masih belum optimal. Tujuan ditunjuknya Bendahara sebagai wajib pungut pajak ini sebenarnya untuk mempercepat arus penerimaan kas Negara lewat pajak yang mereka pungut tersebut. Namun ketika kita lihat praktik di lapangan bahwa banyak hal-hal yang dimaklumi meski dalam praktiknya tidak sama dengan aturan Undang-undang. Apa tidak sebaiknya sebelum mengeluarkan kebijakan hendaknya dipikirkan terlebih dahulu bagaimana pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Bukan dari satu sisi saja yang disorot sehingga diantara kedua belah pihak ini bisa menyatukan pemahaman yang klop saat melakukan transaksi.

Idealnya ketika sebuah kebijakan dibuat, maka diperlukan pengawasan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tersebut terlaksana. Jika kebijakan tersebut hanya dibuat tanpa adanya sosialisasi maupun pengawasan, maka kebijakan tersebut laksana pisau yang tidak diasah, tumpul dan tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan benar. Maka dari itu dirasa sangat perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait Bendaharawan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Pengawasan ini

sebaiknya juga tidak hanya menyoroti dari satu sisi saja. Harus ada kombinasi dari semua pihak yang terlibat agar pelaksanaannya lebih seragam dan sesuai dengan aturan yang ada.

### **SEBUAH EPISODE TERAKHIR YANG BELUM TAMAT**

Berbeda dengan mekanisme pada umumnya, apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Yang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan kepada Bendaharawan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Pertambahan Nilai akan dipungut oleh Bendaharawan bukan pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Pengusaha Kena Pajak Rekanan tetap menerbitkan faktur pajak akan tetapi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungutnya.

Namun, dari hasil temuan peneliti yang terjadi di lapangan justru tidak semulus seperti yang diamanatkan seperti dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003). Faktanya di lapangan ternyata masih banyak toko-toko yang menjadi Rekanan Pemerintah yang belum paham betul tentang penunjukan Bendaharawan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang menimbulkan ketidakseragaman.

Bentuk ketidakseragaman tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penentuan dasar pengenaan pajak yang melebihi nilai seharusnya. 2) Pembuatan faktur pajak dan surat setoran pajak yang diwakili oleh Bendahara. 3) Pembayaran kepada rekanan melebihi jumlah yang seharusnya.

Berdasarkan fakta di lapangan didapat simpulan dari pemaknaan dari tiap-tiap pelakon. Pertama yaitu dilema Bendaharawan “tau kalau salah tapi tetap ingin melaksanakan kewajiban”. Selanjutnya simpulan pemaknaan dari para rekanan yaitu “ketidaktahuan rekanan tentang penunjukan Bendahara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”, masih banyak Rekanan Pemerintah yang tidak

tahu dan tidak paham tentang fungsi penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Tanggapan dari *Account Representative* terkait tugas dalam hal sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Bangkalan sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena dalam hal sosialisasi tidak dilakukan sosialisasi secara bersamaan antara bendahara dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan. Padahal dengan diadakan sosialisasi secara bersamaan tersebut dapat menyatukan pemahaman antara Bendahara dan Rekanan.

Garis besar pemicu ketidakseragaman pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu “terputusnya komunikasi antara Bendaharawan, Rekanan, serta Fiskus Pajak. Belum adanya sosialisasi secara bersamaan antara pihak-pihak terlibat yang menjadi pemicu ketidakseragaman pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan pemahaman antara Bendahara dan Rekanan.

Bentuk pengawasan yang belum optimal berupa pemakluman dari pihak-pihak yang mengawasi dan dibiarkannya ketidakseragaman tersebut terjadi merupakan bentuk kelonggaran dari sebuah pengawasan dalam kebijakan. Idealnya untuk mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut maka diperlukan perbaikan sistem pengawasan agar dapat meminimalisir ketidakseragaman yang terjadi dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Pengawasan juga hendaknya lebih ketat dan tidak hanya menyoroti dari satu sisi saja. Harus ada kombinasi dari semua pihak yang terlibat agar pelaksanaannya lebih seragam dan sesuai dengan aturan.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan ataupun kelemahan yaitu peneliti tidak dapat mengungkap secara lebih mendalam terkait kasus yang terjadi dikarenakan peneliti tidak dapat mewawancarai pemilik toko yang menjadi Rekanan Pemerintah.

Penelitian ini bisa dijadikan gerbang untuk penelitian selanjutnya yang ingin

meneliti dengan tema yang serupa, dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan studi kasus sehingga penelitian ini masih bisa untuk dikembangkan. Serta peneliti selanjutnya bisa menyoroti dari fokus yang berbeda, untuk kebijakan Bendaharawan sebagai pemungut pajak bisa dikaji dari jenis pajak lainnya yang dipungut oleh bendaharawan Pemerintah seperti PPh 22, PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 ayat (2), sehingga dapat ditemukan fakta-fakta baru yang dapat diangkat menjadi sebuah penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell,Jon. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimiyati E.A, 2015. *Studi Interpretif Atas Pajak Perspektif Wajib Pajak Pengusaha Besi Bekas Kapal Tongkang*. Skripsi.Fakultas Ekonomi. Universitas Trunojoyo Madura.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Bendahara Mahir Pajak*. 2011
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. *Kewajiban Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak*. Pengumuman Nomor : PENG - 05/PJ.09/2010.
- Hastutie, Anie. T. 2008. *Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Pemerintah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563 tahun 2003, Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Jakarta, 2003.
- Keputusan direktur jenderal pajak nomor 382 tahun 2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan, Jakarta, 2002.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi.
- Pajak.go.id. *Menyatukan Pemahaman Perpajakan Antara bendahara dan Rekanan*. Diakses 3 maret 2015 06:32.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2013, Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta, 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Jakarta, 2013.
- Prasetyo, Rakhmad I. 2011. *Pemahaman Bendaharawan sebagai pemungut PPN dan PPh 22 Bendaharawan*. Skripsi : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Trunojoyo Madura.
- Puspitasari Y.R, 2014. *Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus : Studi Fenomenologis Pada UKM Hitam Putih*. Fakultas Ekonomi.Universitas Trunojoyo Madura.
- Ratnafuri, Kiki. 2012.*Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah*. Jurnal Multiparadigma, Vol.3 No.3 Desember.
- Republika.co.id. *Bendahara di Pemerintahan punya peran penting*. Diakses 14 maret 2015 7:59.
- Rohma, Fanani. F. *Bercermin pada Usaha Perikanan UD Putra Baru:*

- Pengelolaan Keuangan Berjiwa Pancasila Masih Ada.*  
Skripsi.Fakultas Ekonomi.  
Universitas Trunojoyo Madura.
- Setiawan, Agus dan Hardi. 2006.  
*Perpajakan Bendaharawan Pemerintah.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan A.R, Irianto G, dan Achsin. 2013.  
*Fraud atau (Un) Fraud? Multitafsir “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Hermeneutika Gadamerian.*
- Sialagan, Benny P dan Lubis, Irwansyah. 2002. *Pedoman Perpajakan bagi Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Rekanan Pemerintah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Solahuddin. 2008. *Pelaksanaan Kebijakan Saat Pembuatan Faktur Pajak atas Transaksi antara Pengusaha Kena Pajak Rekanan dan Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.* Skripsi: Universitas Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta,2007.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta, 2009.